PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 5 Halaman 1-11 Maret 2023 *e-ISSN 2657-1579*

IMPLEMENTASI PELAPORAN TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH: MENUJU PERAN AKUNTABILITAS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Syaiful Hifni [1*], Akhmad Sayudi [1], Rano Wijaya [1]
[1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia
[*]Penulis Korespondensi: syaiful.hifni@ulm.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian adalah untuk menilai perbedaan implementasi sistem pelaporan terintegrasi dalam pelaporan manajemen investasi daerah terhadap capaian akuntabilitas tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada entitas Pemerintah Daerah. Metode: studi ini dilakukan pada sistem informasi investasi daerah di pemerintah daerah (Locus kajian pada Kabupaten Tanah Laut). Menggunakan data dari 115 responden yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, badan usaha (PMA/PMDN), LSM/ organisasi peduli lingkungan. Pengukuran data penelitian menggunakan skala nominal dengan *a chi-square test for goodness of fit*. Penelitian ini memberikan fakta empiris: frekuensi pengamatan (OF) bernilai 52,55 dengan *chi square table* bernilai 37,65. Berdasarkan hasil ini menunjukkan OF > EF, ini merupakan bukti kecocokan antara pemikiran terintegrasi yang sesuai dengan pelaporan terintegrasi <IR> dalam sistem informasi investasi daerah. Tingkat hubungan komunikasi informasi dalam capaian akuntabilitas SDGs memiliki koefisien korelasi Pearson sebesar 0,2894, sebagai hubungan yang rendah.

Kata kunci: Sistem, Pelaporan, Informasi, Investasi, Pemerintah, Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran Gubernur dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) bersama dengan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing. Dalam peran yang juga memerlukan keterlibatan masyarakat, organisasi filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Sesuai konteks dalam Pasal 17 ayat 2 (Perpres 59, 2017), yang menyebutkan bahwa Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam konteks pembangunan lingkungan global dan nasional menunjukkan fakta Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim (KLH & K, 2016). Dalam hal ini Perjanjian Paris sebagai kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Konteks ini selaras dengan adanya program baru dari PBB untuk mendukung investasi SDGs di Indonesia (AntaraYogya, 2021). Dalam konteks pemerintah daerah, hal tersebut selaras dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk SDGs yang telah dipenuhi melalui peran Gubernur dengan melibatkan Walikota dan Bupati (Perpres Nomor 59 tahun 2017). Provinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki RAD (Media Indonesia, 2019), dalam keterkaitan model implementasi kebijakan yang mengintegrasikan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 319 target dan indikator TPB/SDGs ke dalam (RPJMD) (Permendagri No 7, 2018). Kalimantan Selatan dengan RAD telah berkomitmen menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai isu daerah yang harus dikelola. Karena memang RAD ini harus sinkron dan terintegrasi dengan dokumen RPJMD. Pemenuhan pada kapasitas yurisdiksi sub-nasional khususnya pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pencapaian indikator semata, melainkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk memastikan komunikasi terkait keamanan ruang hidup, daya pulih produksi dan konsumsi masyarakat serta keberlanjutan fungsi ekologi (Media Indonesia, 2019). Implikasinya ada pada arti penting peran koordinasi yang memerlukan peran implementasi sistem informasi investasi daerah (SIID) yang mengkomunikasikan pelaksanaan TPB/ sustainable development goals (SDGs) pada tingkat daerah.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Implementasi disain sistem informasi investasi daerah (SIID) diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan akuntabilitas pengelolaan manajemen investasi dengan konteks pencapaian tujuan keberlanjutan pembangunan global (IOS, 2004; UU Nomor 32, 2009; Perpres, Nomor 59, 2017; UN, 2017; 2019; UNCTAD, 2018). Meskipun demikian hingga saat ini, masih terdapat tantangan implementasi sistem informasi investasi daerah (SIID) secara nasional, dalam konteks adanya persaingan antar daerah dalam meningkatkan potensi investasi dengan peran komunikasi investasi, dalam kebutuhan pemutakhirkan data di website (Kristianus, 2019). Implementasi teknologi informasi, menunjukkan masih adanya tantangan implementasi pada sistem informasi investasi daerah terkait penyediaan data dan informasi bagi calon investor melalui personel pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian tantangan dalam koordinasi antara SKPD sebagai pemilik data terkait potensi investasi unggulan (Hifni et al., 2019). Adanya ketidaksesuaian data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan, minimnya sarana dan prasarana, serta belum digunakannya tenologi informasi secara optimal (Iswan, 2019). Termasuk tantangan di mana pada situs SIID sebelumnya, informasi masih terbatas, dan sebagian besar daerah belum melakukan *update* data, sehingga informasi yang ada tidak bisa dijadikan referensi oleh investor (Dani, 2019).

Secara normatif, implementasi model terintegrasi sistem informasi investasi daerah memerlukan pendekatan model pemikiran terintegrasi dan pelaporan terintegrasi. Meliputi strategi koneksi, tata kelola, kinerja masa lalu, prospek kinerja ke depan, koneksi departemen fungsional (WICI, 2013; Dumay and Dai, 2017; Hifni et al., 2021a). Dalam menjawab pertanyaan informasi apa yang perlu dikoneksikan dan bagaimana informasi dikoneksikan dalam sistem informasi untuk komunikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (UN, 2017; 2019; IIRC, 2018, 2019). Secara umum dalam konteks penelitian ini, implementasi pemikiran terintegrasi dan pelaporan terintegrasi relevan diterapkan dalam mengkomunikasikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perlunya pemenuhan suatu proses pelaporan terintegrasi dengan pemenuhan kriteria bentuk dan isi informasi sesuai kriteria pelaporan terintegrasi. Mencakup kriteria proses dan konten: (i) Penatagunaan dan tata kelola perusahaan, kapitalisme inklusif, manajemen pembangunan berkelanjutan (SDGs) (UN, 2017, 2019) dan perubahan iklim, globalisasi dan keterkaitan, teknologi, serta energi dan infrastruktur (IIRC, 2018; 2019).

Sejumlah kajian terkait manajemen investasi, pembangunan berkelanjutan, dan sistem informasi dikemukakan. Fakta empirik terkait dampak dari manajemen investasi yang sampai sekarang menunjukkan berbagai tantangan kerusakan lingkungan natural, seperti adanya "*Wetland Loss Through Sustainable Development*" (Aghmiuni et al., 2019; Bernal, dan Netzer, 2020). Kemudian terkait "*Halt biodiversity loss forest areas*" (Goal 15 Infographic, UN, 2020). Serta dampak biaya sosial yang dihadapi dari suatu investasi (Jones, 2012; Artie, 2019). Kajian aspek pengembangan organisasi dalam pelaporan terintegrasi sektoral entitas pemerintah daerah (Sayudi et al., 2016). Kajian akuntablitas aspek ekologi dalam sistem pelaporan akuntansi keberlanjutan (Hifni et al., 2018). Adanya fakta suatu kegiatan investasi di daerah yang harus memasuki tahap moratorium untuk investasi perkebunan (Hifni et al., 2019) demi alasan keberlanjutan lingkungan ekologi. Keseluruhan dampak manajemen investasi ini menjadi tantangan dalam konteks global untuk pengelolaan investasi dalam promosi investasi secara efektif (UNCTAD, 2018). Fakta empirik dari penelitian "*Integrated Reporting, Sustainable Development Goals and the Role of Regional Information System*" (Hifni et al., 2021a) memberikan fakta adanya perbedaan dalam kinerja sistem informasi potensi investasi daerah, dalam hubungan peran antara pemikiran terintegrasi dan pelaporan terintegrasi untuk mengkomunikasikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perspektif pelaporan terintegrasi dalam konteks nasional (Hifni et al., 2021b)

Aspek-aspek yang dikemukakan menunjukkan keterkaitan akuntabilitas keberlanjutan pembangunan dengan fokus bidang unggulan lahan basah dalam konteks rekayasa teknologi informasi, dalam manajemen pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dikembangkan dan tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM ULM sampai tahun 2027. Di mana ULM memiliki strategi untuk menjadi Pusat Ungulan Lahan Basah di Wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah penelitian ini, penting untuk diteliti bagaimana implementasi model pelaporan terintegrasi dalam sistem informasi investasi daerah (SIID) dapat berperan dalam mengkomunikasikan aspek-aspek manajemen pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada entitas pemerintah daerah (melalui locus kajian di Kabupaten Tanah Laut- Kalimantan Selatan).

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

(i) Untuk mengukur perbedaan komunikasi manajemen pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui implementasi model pelaporan terintegrasi (strategi penghubung, tata kelola, kinerja masa lalu, prospek kinerja ke depan, fungsi penghubung antar unit kerja) dalam sistem informasi investasi daerah (SIID) pemerintah daerah.

(ii) Untuk mengukur hubungan komunikasi manajemen pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui implementasi model pelaporan terintegrasi (strategi penghubung, tata kelola, kinerja masa lalu, prospek kinerja ke depan, fungsi penghubung antar unit kerja) dalam sistem informasi investasi daerah (SIID) Pemerintah daerah.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memberikan informasi implementasi pelaporan terintegrasi dalam sistem informasi investasi daerah untuk mengkomunikasikan manajemen pembangunan berkelanjutan pada Pemerintah Daerah (melalui *Locus Study* di Kabupaten Tanah Laut - Kalimantan Selatan).

2. METODE

2.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik non parameterik (Conover, 1980; Howell, 2011). Dalam menguji perbedaan penerapan variabel independen terhadap variabel dependen, serta menilai tingkat keeratan hubungan antar variabel penelitian. Tujuan utamanya adalah mendapatkan pemahaman yang baik dari berbagai perspektif tentang fenomena yang diteliti. Melalui pemeriksaan silang data, setidaknya dari dua sumber atau metode dan menilai relevansinya.

2.2. Metode Penelitian

2.2.1. Sampel dan Unit Analisis

Kerangka sampel penelitian direncanakan meliputi: (i) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah (ii) Perusahaan yang berinvestasi (PMDN dan PMA) di Kalimantan Selatan, (iii) pihak akademisi, serta (iv) organisasi nir laba (NGO) peduli lingkungan.

Tabel 1. Kerangka dan Proporsi Sampel Penelitian

No	Klasifikasi subjek	Unit Sampel	Rasio Sampel
1	Satuan Kerja Pemerintah Daerah–Provinsi-Kabupaten-Kota	36	31,30 %
2	Sektor Dunia usaha PMDA PMA	18	15,65 %
3	Akademisi	57	49,56 %
3	NGO	4	3,49%
	Jumlah	115	100 %

(*Sumber, diolah, data lapangan, 2022*)

Kerangka sampel penelitian ini mengacu pada hasil pemenuhan sampel penelitian yang meliputi entitas SKPD, entitas Dunia usaha dan NGO pada Provinsi-Kabupaten-Kota Kalimantan Selatan. Jumlah unit sampel dalam kerangka sampel penelitian ditetapkan untuk dapat memenuhi syarat analisis data. Di mana dengan 6 (enam) variable /dimensi penelitian ini (Tabel 2), memerlukan pemenuhan syarat sampel melalui perkalian 5-10 dikali 6 (30 sampai 60) jumlah unit sampel penelitian (Hair *et al*., 2006). Sesuai kerangka sampel penelitian ini memiliki *relevant range* untuk kecukupan sampel yang mencapai jumlah 115 unit sampel.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

2.2.2. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Definisi operasional variabel dan pengukurannya disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kerangka dan Proporsi Sampel Penelitian

Tipe variable	Deskripsi variabel dan indicator	Pengukuran
Independen	X.1. Implementasi pelaporan terintegrasi melalui strategi penghubung, sebagai pemikiran terintegrasi untuk strategi komunikasi dalam pemenuhan kelengkapan informasi yang diintegrasikan untuk setiap unit investasi daerah melalui SIID, yang diukur dalam 6 item indikator (IIRC, 2013; WICI, 2013; Dumay and Dai, 2017; Hifni et al., 2021a)	Nominal
	X.2. Implementasi pelaporan terintegrasi melalui tata kelola, sebagai pemikiran terintegrasi dalam rangkaian proses kebijakan terkait acuan regulasi, untuk pemenuhan kelengkapan informasi yang di-integrasikan, dan dikomunikasikan untuk setiap unit investasi daerah melalui SIID, yang diukur dalam 6 item indikator (IIRC, 2013; WICI, 2013; Dumay dan Dai, 2017; Hifni et al., 2021a).	Nominal
	X3. Implementasi pelaporan terintegrasi melalui kinerja masa lalu, sebagai pemikiran terintegrasi untuk pemenuhan kelengkapan informasi kinerja masa lalu yang diintegrasikan, dan dikomunikasikan untuk setiap unit investasi daerah melalui SIID, yang diukur dalam 6 *item indicator* (IIRC, 2013; WICI, 2013; Dumay dan Dai, 2017; Hifni et al., 2021a).	Nominal
	X4: Implementasi pelaporan terintegrasi melalui prospek ke depan, sebagai pemikiran terintegrasi untuk pemenuhan kelengkapan informasi prospek kinerja ke depan yang diintegrasikan, dan dikomunikasikan untuk setiap unit investasi daerah melalui SIID, yang diukur dalam 6 item indikator (IIRC, 2013; WICI, 2013; Dumay dan Dai, 2017; Hifni et al., 2021a).	Nominal
	X5: Implementasi pelaporan terintegrasi melalui fungsi penghubung antar unit kerja, sebagai pemikiran terintegrasi dalam pengendalian hubungan antara fungsi kerja dalam mengkomunikasikan setiap unit investasi daerah melalui SIID, yang diukur dalam 6 item indikator (IIRC, 2013; WICI, 2013; Dumai dan Dai, 2017; Hifni et al., 2021a).	Nominal
Dependen	Y: Manajemen pembangunan berkelanjutan: Implementasi aspek– aspek manajemen pembangunan berkelanjutan (IIRC, 2018, 2019; UN, 2017, ADB, UN, 2019; UN, 2019) dalam implementasi SIID, yang diukur dalam 6 item indikator.	Nominal

(*Sumber, diadaptasi, sesuai sumber referensi, 2022*)

2.2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan teknis *Statistic Non Parametric* yaitu *Chi-Square* dan menggunakan tabel *Contingency* dalam mengukur frekuensi observasi (Fo) dan frekuensi yang diharapkan (Fe). Rumus:

$$\sum \mathbf{ij} = \mathbf{ni} \times \mathbf{nj} / \mathbf{N} \quad (1)$$

Dimana:

- $\sum \mathbf{ij}$ = distribusi frekuensi yang diharapkan pada baris ke **i**, kolom ke **j**;
- **ni** = jumlah frekuensi baris ke **i**;
- **nj** = jumlah frekeunsi kolom ke **j**;
- **N** = jumlah seluruh frekuensi **i** = 1, 2, 3, …dan **j** =1, 2, 3, …

Berdasarkan perhitungan dengan formulasi di atas, mendasari penggunaan analisis data ke dalam rumus Chi-Kuadrat:

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

$$\sum_{j=1}^{r} \sum^{k} (Oij - \sum ij)2 / \sum ij \; i=1 \qquad (2)$$

Dimana: **r** = kolom; **k** = baris;
Oij = distribusi frekuensi observasi baris ke i, kolom ke **j**;
∑ij = distribusi frekuensi pengharapan baris ke i, kolom ke **j**;

Olah data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan alat uji chi-square dan penggunaan tabel kontingensi, dalam mengukur frekuensi observasi (OF) dan frekuensi yang diharapkan (EF). Hasil analisis frekuensi observasi diklasifikasikan dalam kesesuaian antara setiap komponen pemikiran terintegrasi dengan komponen pelaporan terintegrasi. Dalam kriteria capaian, mulai sangat sesuai (skor 6), sesuai (skor 5), cukup sesuai (skor 4), kurang sesuai (skor 3), sangat kurang sesuai (skor 2), dan tidak sesuai (skor 1). Untuk menilai uji beda hipotesis (Ho1), serta untuk menguji tingkat hubungan antar variabel (Ho2), digunakan *chi-Square goodness of fit test* atau uji chi-square untuk independensi dalam nilai *C-contingency* (Conover, 1980).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan temuan penelitian ini, dalam deskripsi dan pengukuran item indicator untuk dasar pengukuran dan pengujian hipotesis. Hasil pengukuran masing-masing item indikator disajikan pada Gambar 1 serta dalam Gambar 2 dan gambar 3 berikut ini.

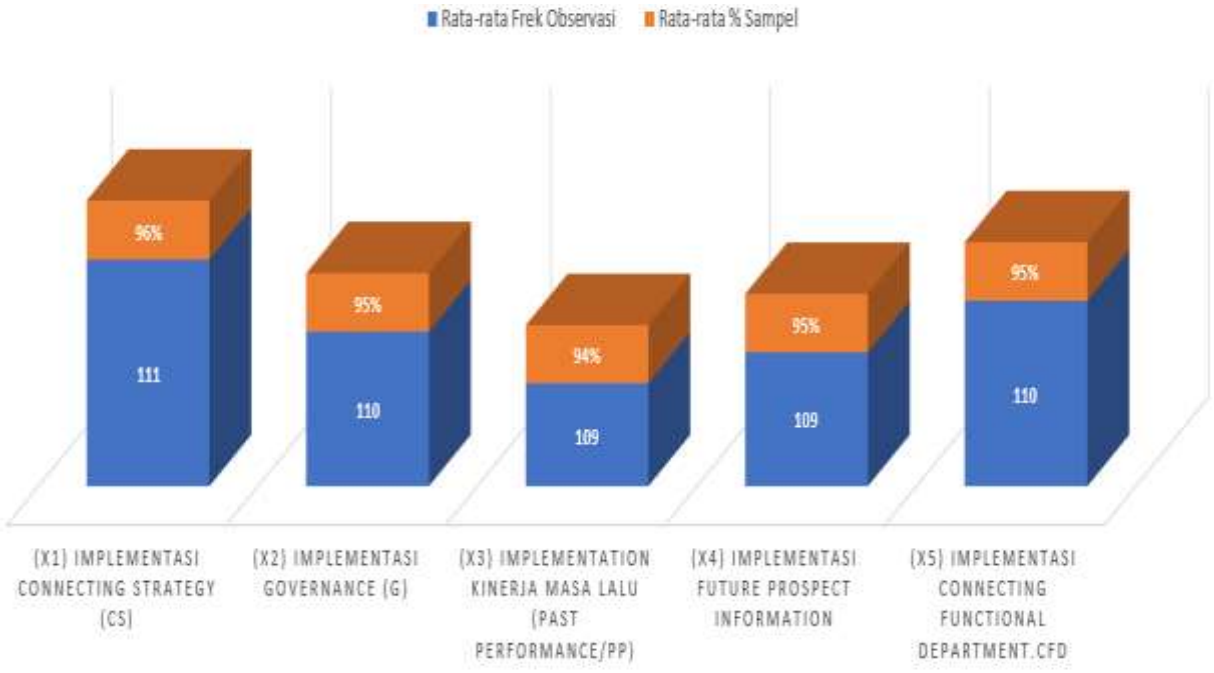

Gambar 1. *Scorekeeping* informasi indikator *Integrated Thinking* (IT)

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

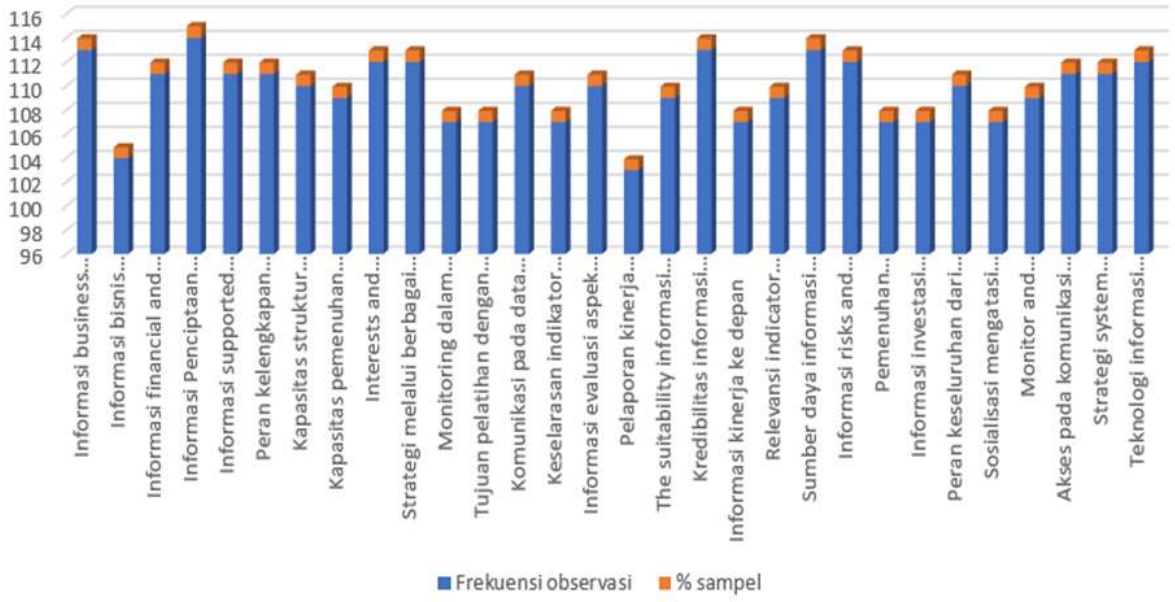

Gambar 2. *Scorekeeping* informasi item indikator *Integrated Thinking* (IT)
(*Sumber: data scorekeeping, 2022*)

Sebagaimana tercantum pada Gambar 1 dan gambar 2 menyajikan daftar lengkap lima indikator dengan 30 item indikator dalam dimensi pelaporan terintegrasi (WICI, 2013; IIRC, 2013; IFAC, 2017) dalam system informasi investasi daerah (SIID), terhadap bentuk dan proses pelaporan informasi SDGs. Hal ini juga menunjukkan hasil pengukuran persepsi penyedia SIID yaitu pemerintah daerah dalam mengubah perilaku berpikir terintegrasi yang sesuai dengan <IR> dalam implementasi SIID. Data pengukuran juga menunjukkan persepsi dari pengguna atau pemangku kepentingan mengacu pada perubahan harapan untuk implementasi <IR> di dalam SIID. Perspektif ini dilakukan baik dari perspektif badan usaha, maupun dari pemangku kepentingan termasuk akademisi, LSM dalam pandangan mereka untuk implementasi SIID untuk SDGs (Gambar 2)

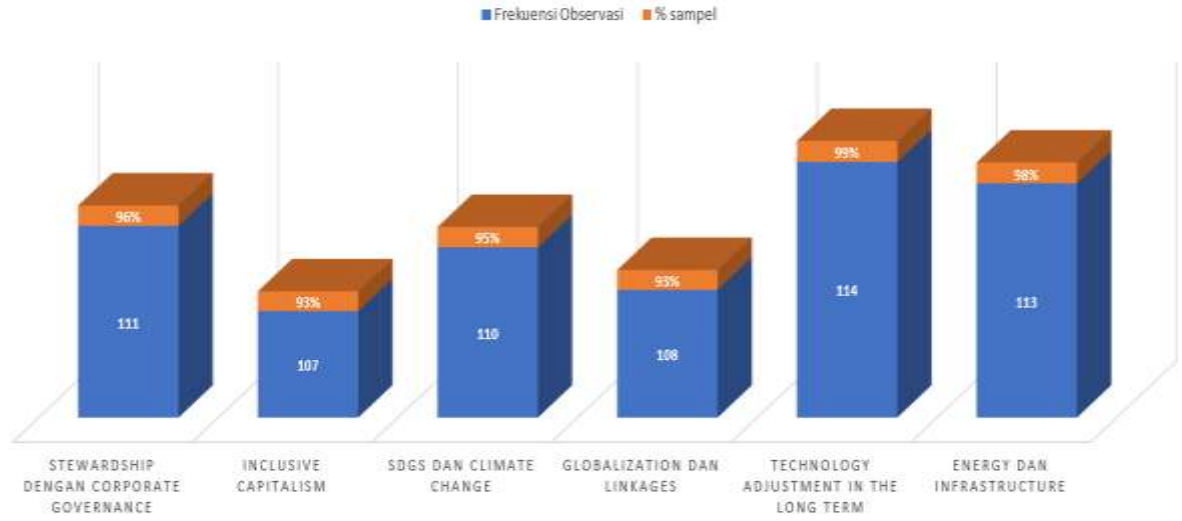

Gambar 3. Item indikator capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
(*Sumber: data scorekeeping, 2022*)

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Sebagaimana dinyatakan dalam Gambar 3, ini menunjukkan persepsi penyedia SIID dan pemangku kepentingan dalam memenuhi silo hingga keterlibatan dengan dimensi pelaporan terintegrasi (UN, 2016, 2019, 2020; ADB, UN, 2019; IIRC, 2018, 2019). Ini berarti bahwa unit analisis dalam perspektif implementasi <IR> sesuai fakta empiric hasil pengukuran menunjukkan ada mempertimbangkan informasi apa yang perlu dihubungkan dalam komunikasi SIID, dan bagaimana informasi tersebut terhubung untuk dikomunikasikan bagi pengguna melalui peran pelaporan terintegrasi.

3.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Informasi hasil pengukuran item indikator pemikiran terintegresi (integrated thinking/IT) yang sesuai dengan dimensi pelaporan terintergasi (integtared reporting <IR>, dan dengan butir indikator untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Gambar 1 dan 2 dan gambar 3). Menjadi dasar untuk menentukan frekuensi observasi (OF) dan frekuensi harapan (EF) (Tabel 3) dan (Tabel 4) untuk penilaian observasi kontingensi & chi square. Hasil analisis frekuensi observasi diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian antara masing-masing komponen berpikir terpadu yang sesuai dengan <IR>. Hasil pengukuran diklasifikasikan ke dalam kriteria sebagai berikut: sangat sesuai (skor 6), sesuai (skor 5), cukup sesuai (skor 4), kurang sesuai (skor 3), tidak sesuai (skor 2), dan sangat tidak sesuai (skor 1).

Tabel 3. *Observation Frequency* (OF) dan *Expectation Frequency* (EF)

Variables	CS	G	PP	FP	CD	SDGs	Jumlah
Keselarasan (IT) dengan <IR>							
Sangat selaras: IT & IR :Score 6 (OF)	99	96	91	97	97	101	480
EF	96	96	96	96	96	96	
Selaras :IT & IR: Score 5 (OF)	10	13	15	7	11	8	56
EF	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	
Cukup selaras: IT & IR: Score 4 (OF)	4	3	5	7	4	2	23
EF	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
Kurang selaras IT & IR: Score 3 (OF)	0	2	3	2	2	4	9
EF	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
Sangat kurang selaras: IT & IR: Score 2 (OF)	2	1	1	2	0	0	6
EF	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
Tidak selaras: IT & IR :Score 1 (OF)	0	1	0	0	1	0	2
EF	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
Jumlah	115	115	115	115	115	115	575

(*Sumber: Diolah sesuai hasil pengukuran dalam Gambar 2 dan Gambar 3, 2022*)

Tabel 4. *Contingency & Chi Square Observation*

Variabel	CS	G	PP	FP	CD	SDGs	Jumlah
	3	0	-5	1	1	5	
	9	0	25	1	1	25	
Xo Observation	0.0936	0	0.2604	0.0104	0.0104	0.2604	0.6354
	-1.2	1.8	3.8	-4.2	-0.2	-3.2	
	1.44	3.24	14.44	17.64	0.04	10.24	
Xo Observation	0.1286	0.2893	1.2893	1.575	0.0036	0.9143	4.2
	-0.6	-1.6	0.4	2.4	-0.6	12.4	
	0.36	2.56	0.16	5.76	0.36	153.76	
Xo Observation	0.0783	0.5565	0.0348	1.2522	0.0783	33.4261	35.4261
	-1.8	0.2	1.2	0.2	0.2	2.2	
	3.24	0.04	1.44	0.04	0.04	4.84	
Xo Observation	1.8	0.0222	0.8	0.0222	0.0222	2.6889	5.3556

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Variabel	CS	G	PP	FP	CD	SDGs	Jumlah
	0.8	-0.2	-0.2	0.8	-1.2	-1.2	
	0.64	0.04	0.04	0.64	1.44	1.44	
Xo Observation	0.5333	0.0333	0.0333	0.5333	1.2	1.2	3.5333
	-0.4	0.6	-0.4	-0.4	0.6	-0.4	
	0.16	0.36	0.16	0.16	0.36	0.16	
Xo Observation	0.4	0.9	0.4	0.4	0.9	0.4	3.4
							52.5504

(*Sumber: Diolah dari data Table 3, 2022*)

Berdasarkan data dari hasil pengukuran pada Tabel 3 dan Tabel 4 menjadi dasar pengujian hipotesis untuk uji beda (H01), dan untuk pengujian hubungan antar variabel (H02), yang dilakukan dengan uji chi-square untuk *goodness of fit test*. Seperti yang tertera pada Tabel 4 menunjukkan hasil pengukuran frekuensi observasi (OF) yang mencapai nilai 52,5504. Kemudian untuk pengukuran frekuensi harapan (EF) yang ditentukan dengan mengacu pada derajat kebebasan baris dan kolom (6-1) (6-1) dengan taraf signifikan 0,05, memiliki nilai frekuensi untuk chi square tabel adalah 37,65. Berdasarkan perbandingan antara X2 observasi 52.5504 yang lebih besar dari X2 Tabel 37.65, hal ini berarti H01 dapat ditolak, dengan nilai signifikansi chi-square < 0,05. Sesuai hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (UN, 2017, ADB, UN, 2019; UN, 2019; IIRC, 2018, 2019) dengan komunikasi SIID didukung pelaporan terintegrasi. Sesuai fakta menunjukkan adanya implementasi SIID di pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pemikiran terintegrasi (IIRC, 2013; WICI, 2013; Dumay dan Dai, 2017; Hifni et al., 2021a) untuk komunikasi pencapaian akuntabilitas SDGs.

Pengujian hipotesis kedua (H02), dilakukan dengan menilai tingkat hubungan antar variabel, berdasarkan hasil uji beda (H01), dengan menghitung nilai koefisien kontingen Pearson C= 52.5504 / (575 + 52.5504) diperoleh nilai koefisien sebesar 0,2894. Mengacu pada kaidah empiris Guilford menunjukkan bahwa nilai C-contingency merupakan koefisien asosiasi terbatas antara 0<1, dimana 0= tidak ada asosiasi/hubungan, dan 1=hubungan/hubungan sempurna. Dengan hasil koefisien kontingensi 0,2894, dapat dinyatakan sebagai hubungan rendah, pasti tetapi hubungan kecil (Engelbrecht dan Van Aswegen, 2009). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah dalam pencapaian akuntabilitas SDGs melalui komunikasi RIIS karena kesesuaian pemikiran terintegrasi yang sesuai dengan implementasi <IR> pada system informasi investasi daerah.

3.3. Pembahasan

Sesuai fakta hasil penelitian menunjukkan adanya peran baik dari sisi pemerintah daerah maupun dari aspek keterlibatan pemangku kepentingan yang mendukung implementasi <IR> dalam implementasi SIID. Hal ini merupakan bentuk bukti penelitian yang menunjukkan capaian akuntabilitas dalam kejelasan peran pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan informasi SDGS dari proses bisnis atau siklus pengelolaan investasi daerah. Fakta adanya peran pemangku kepentingan, seperti investor dalam mematuhi komunikasi informasi investasi dalam kelengkapan dimensi informasi SDGs. Penerapan <IR> yang efektif dapat memperkuat proses bisnis terpadu pengelolaan investasi daerah sesuai dengan rencana aksi daerah (RAP) untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan melalui subsektor penanaman modal daerah.

Desain sistem informasi investasi daerah (SIID) berfungsi dalam pendokumentasian hasil pemetaan peluang investasi atau penanaman modal di daerah. Melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (Peraturan BKPM, Nomor 7 Tahun 2017). Hal ini sesuai dengan acuan PMDN, Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dalam konteks mengkomunikasikan aspek pembangunan dalam hal investasi terkait informasi potensi investasi daerah. Sesuai kondisi geografis, demografis, ekonomis, sarana dan prasarana pendukung investasi, serta komoditi unggulan, berbasis e-database, e-reporting. Sistem informasi investasi daerah didisain sesuai tujuan reformasi pelayanan perizinan digital melalui *Online Single Submission* (OSS) (PP Nomor 24, Tahun 2018). Desain sistem informasi investasi daerah dikelola oleh BKPM, DPM & PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota (*website* www.regionalinvestment.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

bkpm.go.id). Memenuhi kesesuaian dengan regulasi yang mengatur implementasi sistem informasi investasi daerah (Peraturan BPKM, No. 9 tahun 2017). Sistem informasi investasi daerah merupakan bagian integrasi dari sistem *National Single Window for Investment* (NSWI) (BKPM, 2018), merepresentasikan perwakilan resmi BKPM di luar negeri. Menjadi bagian fungsi layanan dari sistem pemasaran investasi nasional untuk investor mancanegara melalui peran *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC).

Implementasi model pelaporan terintegrasi ke dalam sistem informasi investasi daerah (SIID) dibutuhkan sebagai salah satu instrumen kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam mengkomunikasikan potensi investasi regional terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebagai sistem informasi potensi investasi daerah, yang memiliki input sistem informasi yang memuat antara lain informasi tentang *why* Indonesia, peluang investasi, insentif, perizinan dengan *online single submission* (OSS), infrastruktur, dan potensi perusahaan yang siap bermitra dengan update data kerja sama/link antar-K/L dan asosiasi usaha (Kristianus, 2019). Sistem informasi investasi berperan dalam mengkomunikasikan manajemen investasi di setiap daerah di Indonesia, telah dirancang dalam disain sistem informasi investasi daerah (SIID) (Peraturan BKPM, No. 9, 2017). Suatu sistem yang dirancang untuk memenuhi kesesuaian peran dalam konteks siklus manajemen investasi global untuk mengkomunikasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (Malmborg, 2002; OECD, 2014; Pineiro et al., 2018).

Fakta hasil penelitian menunjukkan dimensi '*integrated thinking*' yang memiliki lima indikator dapat memenuhi '*silos to engagement*' dengan penerapan <IR> melalui fungsi dan peran SIID yang memberikan *value creation* dari waktu ke waktu sesuai perspektif *global* pembangunan keberlanjuan. Terdapat fakta empiris tentang (i) strategi penghubung sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip panduan dalam fokus strategis dan konektivitas informasi, dan (ii) aspek tata kelola dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana struktur tata kelola disusun. tata kelola organisasi mendukung kemampuan untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang dari elemen konten <IRF>, (iii) pemenuhan komunikasi informasi kinerja masa lalu dengan menghubungkan cakrawala waktu, untuk tetap fokus pada kinerja historis, (iv) penyajian yang konsisten dari informasi terkait peluang, risiko, dan strategi masa depan. Kemudian, fakta penelitian menunjukkan bahwa ada peta jalan sebagai dasar untuk masa depan organisasi yang mengelola investasi daerah. Dengan adanya dukungan dari pihak internal pemerintah daerah untuk memutuskan bagaimana hubungan fungsional departemen (IIRC, 2013; WICI, 2013) dalam mengkomunikasikan informasi SDGs (UN, 2016, 2017, ADB, UN, 2019; IIRC, 2018, 2019).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini, kesimpulan penelitian disajikan dalam beberapa aspek.

1. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian sebelumnya dalam mengkomunikasikan implementasi <IR>, sebagai road map penelitian bagi pemerintah daerah untuk mencapai SDGs melalui peran sistem informasi investasi daerah secara nasional (Hifni et al., 2021). Oleh karena itu, hasil penelitian yang mensintesakan adanya implementasi <IR> dalam pengembangan SIID untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota yang berimplikasi pada perlunya studi lebih lanjut tentang implementasi SIID di tingkat provinsi sebagai Koordinator dan Pembina Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah tingkat provinsi bertindak sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang otonom di Indonesia dalam implementasi SIID secara nasional.
2. Hasil penelitian ini memberikan bukti dalam kaitannya dengan tujuan dan manfaat penelitian. Sebagai fakta empiris membuktikan bahwa model berpikir terintegrasi dapat digunakan sebagai dasar implementasi <IR> dalam implementasi Sistem Informasi Investasi daerah (SIID) untuk mengkomunikasikan informasi pencapaian SDGs. Berdasarkan hasil tersebut, implementasi SIID yang efektif memerlukan peran aspek pengembangan organisasi pada tataran strategis, administratif, sosial, dan teknis dalam lingkup keselarasan dimensi pemikiran terintegrasi dan pelaporan terintegasi .
3. Penelitian selanjutnya dianggap penting untuk menggunakan pendekatan peran regulasi yang optimal untuk implementasi <IR> dalam pengembangan SIID secara substantif dengan konsep penilaian dampak regulasi (RIA) pada peran di tingkat Pemerintah Provinsi.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat atas dukungan pada penelitian Tahun 2022. Serta, terima kasih pada Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022 atas kesempatan kami dapat menyajikan hasil penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aghmiuni, Samaneh, S., Nockrach, Minnoka, Kalantari, Zahra. (2019).*The potential of wetlands in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda*, ResearchGate, Water 11 (3), MDPI, DOI: 10.3390/w11030609, www.mdpi.com/journal/water

Artie, W. Ng. (2019). Socially Responsible Investing in Sustainable Development, *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education,* Publisher: Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-63951-2_301-1

ADB, UN Environment. (2019). Strengthening the Environmental Dimensions of Sustainable Development Goals in Asia Pacific Tool Compendium, DOI: HTTP//DX.DOI.ORG/10.22617/TIM190002-2

Bernal, B. and Netzer, M. (2020). *Fighting Wetland Loss Through Sustainable Development.* https://winrock.org/voices/page/2/

BKPM, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah. (2017). Laporan Akhir Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Invesasi daerah, Penyusun PT Abdi Nusa Kreasi, Jakarta

BKPM. 2018, National Single Window for Investment (NSWI). (2018). Organized by BKPM, https://nswi.bkpm.go.id/sitemap

BKPM. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Daerah dalam Meningkatkan Iklim Investasi, Direktur Pengembangan Potensi Daerah, Berinvestasi Remarkable Indonesia; http://dpmptsp.riau.go.id/media/file/Strategi-Pengembangan-Potensi-Daerah-Dalam-Peningkatan-Iklim-Investasi.pdf

Conover, W.J. (1980). *Practical Nonparametric Statistics,* 2nd Edition. New York : John Wiley & Sons

Dani, J. A. (2019). Masalah ini Bikin Investor Pikir-Pikir Investasi di Indonesia. Diakses melalui https://economy.okezone.com/read/2019/10/04/320/2113052/masalah-ini-bikin-investor-pikir-pikir-investasi-di-indonesia pada 04 Oktober 2019

Dumay, C J. and Dai, T. (2017). Integrated thinking as a cultural control?; *Meditari Accountancy Research*, https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2016-0067

Hair,J.E., Andersson, R.E., Tatham, R.L.and Black, W.C. (2006). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall International.

Hifni, S., Sayudi, A., Hayat, A. (2018). Peran Akuntansi Keberlanjutan: Akuntabilitas dalam Ekologi, Sosio, dan Ekonomi. Prosiding Seminar Lahan Basah, LPPM, ULM, p-ISSN:2623-1611 & e-ISSN: 2623-1980

Hifni, S., Sayudi, A., Sa'roni, C., Ichsan, M. (2019). Kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten tanah laut Tahun 2019, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat dengan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Tanah Laut, 2019,

Hifni, S., Sayudi, A., Hayat, A., Kadir, A., Wijaya, R. (2021). Integrated Reporting, Sustainable Development Goals and The Role of Regional Information System, *Universal Journal of Accounting and Finance* 9 (3), 362-371, DOI: 10.13189/ujaf.2021.090310. http://www.hrpub.org

Hifni, S., Sayudi, A., Wijaya, R. (2021). Integrated Reporting <IR> Implementation: *The Convergent Path and Contingent Role as an Initiative to Effective Environmental Reporting in Indonesia*, The 2nd IFBE and *The* 7th ISWEM, Banjarmasin

Howell, D.C. (2011) Chi-Square Test: Analysis of Contingency Tables. In: Lovric M. (eds) *International Encyclopedia of Statistical Science*. https://doi.org/ 10.1007/978-3-642-04898-

Iswan, U. (2018). Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID). Diakses melaui https://kalbarprov.go.id/berita/sistem-informasi-potensi-investasi-daerah-sipid.html

International Integrated Reporting Committee (IIRC). (2013). *Consultation Draft of the International <IR> Framework*, International Integrated Reporting Council, London; www.theiirc.org/consultationdraft2013.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

……. (2018). *Breaking Through IIRC Integrated Report. (2017)*. web: www.integratedreporting.org

……. (2019). Building Momentum, IIRC Integrated Report . Diakses memalui https://integratedreporting.org/integratedreport2018/index_ desktop.html

International Organization for Standardization (IOS). (2004). *ISO 14001:2004, Environmental Management Systems,* International organization for Standardizations. Geneva. www.iso.org

Jones, S. (2012). Sustainability Reporting and Assurance: State of Practice, Chapter 1, *Contemporary Issues in Sustainability Accounting, Assurance and Reporting*, Emerald Group Publishing Company, ISBN 978-1-78052-020-9

Kristianus, A. (2019). Investor Daily Indonesia: Lima Provinsi Masih Jadi Fokus Investasi BKPM Hadirkan Sistem PIR untuk Dorong Pemerataan. Diakses melalui Investasi/arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com/ Investor.id

Malmborg, F.B. (2002). Environmental Management Systems, Commuicative action and organizational learning, *Business strategy and the environment,* vol. 11, No. 5, pp 312-321

Media Indonesia. (2019). Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGs, Mediaindonesia.com. Diakses melalui https://apps.mediaindonesia.com/read/detail/233224-pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs

OECD. (2014). *Effective Public Investment A Cross Levels of Government Principles for Action,* http://www.oecd.org /effective-public-investment-toolkit/

Pineiro, A.,Dithrich, Hannah., Arti, D. (2018). *Financing The Sustainable Development Goals: Impact Investing in Action, Global Impact Investing Network (GIIN)*. Diakses melalui https://thegiin.org/research/publication/financing-sdgs

Sayudi, A., Hifni, S., Sa'roni, C. (2016). Faktor-Faktor Pengembangan Organisasi Untuk Implementasi Sistem pelaporan Terintegrasi Sektoral (Studi Pada Pemda Di Kalimantan Selatan), LPPM ULM, Kemristek Dikti

United Nation. (2017). The Sustainable Development Agenda. Diakses melalui https://www.un.org/sustainabledevelopment/ development-agenda-retired/

United Nations. (2019). Department of Economic and Social Affairs. GSDR 2019, Global Sustainable Development Report, 2019. The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development. Diakses melalui https:// sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019

United Nations. (2020). *Department of Economic and Social AffairsSustainable Development*. SDG 15. Goal 15 infographic, source: https//unstats.un.org/sdgs/report/2020/. Diakses melalui https://sdgs.un.org/goals/goal15

UNCTAD. (2018). Promoting Investment In The Sustainable Development Goals, Investment Advisory Series, Series A, Number 8. Diakses melalui http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/

World Intellectual Capital Initiative (WICI). (2013). *Connectivity: Background Paper for <IR>*, International Integrated Reporting Council, London. Diakses melalui https://examples.theiirc.org/

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Diakses melalui http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298#:~:text=Perjanjian%20Paris%20merupakan%20kesepakatan%20global,%2C%20ditambah%20aksi%20pra%2D2020.

Antarayogya. (2021). Diakses memalui https://jogja.antaranews.com/berita/524613/pbb-meluncurkan-program-baru-pacu-investasi-sdgs-di-indonesia

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat